

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP *TRADEOFF* INFLASI DAN PENGANGGURAN : PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Amalia Nuril Hidayati

amalianoeril@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dwika Permata Sari

dwikapermata07@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Via Aprillia Nanda Lestari

aprilliananda2304@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Muhammad Nada Choiruddin

nadachoiruddin@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Adinda Desi Rahmawati

rahmawatidinda215@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur 66221

Abstract. *This study aims to analyze government policies on the tradeoff between inflation and unemployment using an Islamic economic perspective. Inflation and unemployment are major problems in the economy that are interrelated and often cause tradeoffs, so researchers examine how government policies can overcome these tradeoffs by considering Islamic economic principles. This study uses a library research method with a descriptive analytical and interpretative approach based on academic literature. The results of the study indicate that the implementation of government policies in overcoming the tradeoff between inflation and unemployment from an Islamic economic perspective must be based on the principles of social justice and fair distribution of wealth. Empirically, fiscal and monetary policies packaged with the principle of justice can effectively suppress inflation while reducing unemployment. In addition, social empowerment and efforts to improve community welfare are important factors in creating sustainable economic stability.*

Keywords: *Government Policy; Inflation; Islamic Economics; Tradeoff; Unemployment.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap *tradeoff* inflasi dan pengangguran dengan pendekatan perspektif ekonomi Islam. Inflasi dan pengangguran merupakan masalah utama dalam perekonomian yang saling berkaitan dan sering kali menimbulkan *tradeoff*, maka peneliti mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengatasi *tradeoff* tersebut dengan memperhatikan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis dan interpretative berdasarkan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah dalam mengatasi *tradeoff* antara inflasi dan pengangguran dari perspektif ekonomi Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Secara empiris, kebijakan fiskal dan moneter yang dikemas dengan asas keadilan dapat secara efektif menekan inflasi sekaligus mengurangi pengangguran. Selain itu, pemberdayaan sosial dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Inflasi; Kebijakan Pemerintah; Pengangguran; Tradeoff.*

PENDAHULUAN

Inflasi dan pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Keduanya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian. Namun untuk menjaga stabilitas keduanya sangat sulit karena secara teori bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan terbalik (*trade off*) dan para *stakeholder* harus dapat memilih salah satunya untuk menekan angka inflasi atau mengurangi pengangguran. Tingkat inflasi di negara dengan ekonomi yang baik berkisar antara 2-4% per tahun, yang disebut tingkat inflasi yang rendah. Tingkat inflasi yang lebih tinggi berkisar antara 7-10%, disebut *hyper inflation*. (Ira Kusumastuti & Hadi Sasana, 2023)

Inflasi atau kenaikan terus-menerus harga barang dan jasa, dianggap sebagai riba atau penyalahgunaan kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam bergantung pada keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang adil. Daya beli uang akan berkurang jika inflasi tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak buruk pada masyarakat karena akan lebih sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pengangguran dalam Islam juga sangat penting, pengangguran yang tinggi dapat disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan kesempatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakstabilan sosial bagi masyarakat yang terkena dampaknya. (Intan dkk, 2024)

Dengan demikian, pemerintah menghadapi dilema tentang seberapa jauh mereka harus mendorong kebijakan ekonominya. Memahami perbedaan antara inflasi dan pengangguran serta hubungan antara keduanya sangat penting untuk membuat keputusan yang optimal dalam situasi ini. Setelah setiap persamaan dalam model tersebut ditentukan dan diestimasi dengan tepat, model dapat digunakan untuk menemukan perbedaan antara inflasi dan pengangguran dengan lebih akurat. (Leightner, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap *tradeoff* inflasi dan pengangguran melalui pendekatan perspektif ekonomi Islam. Melalui penggunaan data historis dan pendekatan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh hubungan antara kedua variabel tersebut dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi hubungan antara inflasi dan pengangguran, seperti krisis ekonomi global atau pergeseran kebijakan pemerintah.

KAJIAN TEORI

N. Gregory Mankiw, Euston Quah, dan Peter Wilson pada tahun 2014 dengan judul “Pengantar Teori Ekonomi Makro” menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi tidak terjadi karena fluktuasi harga sementara, melainkan mencerminkan pergeseran tingkat harga secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dalam penelitiannya Priyono dan Zainuddin Ismail (2012) menyebutkan bahwa Teori *trade-off* antara inflasi dan pengangguran merujuk pada hubungan yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik (*trade-off*) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, terutama dalam jangka pendek. Teori ini menyatakan bahwa ketika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah dan ketika inflasi rendah, tingkat pengangguran tinggi. Teori menemukan hubungan terbalik yang konsisten ketika pengangguran tinggi, upah meningkat perlahan, ketika pengangguran rendah, upah naik dengan cepat.

Vinna Sri Yuniarti pada tahun 2016 dengan judul “Ekonomi Makro Syariah” menyatakan bahwa kebijakan moneter yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal terdiri atas perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk memengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Sehingga kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

M. Nur Rianto Al-Arif pada tahun 2011 dengan judul “Dasar-Dasar Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid* atau tujuan, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat. Sedangkan ilmu ekonomi islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, dan dokumen). Penelitian berikut mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang

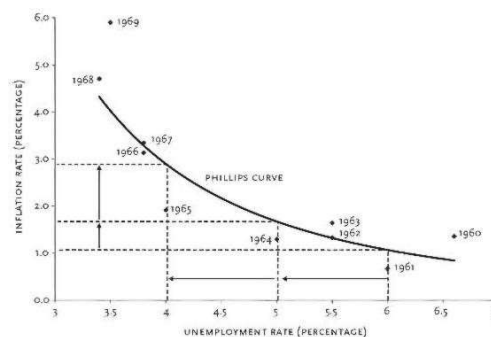
terdapat di dalam tubuh literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Trade-Off Inflasi dan Pengangguran dalam Ekonomi Konvensional

Inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator yang dapat menggambarkan performa ekonomi di suatu negara. Hubungan kedua variabel tersebut merupakan masalah ekonomi makro yang banyak didiskusikan dalam praktik ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran baik secara teoritis maupun praktis. Relevansi hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran juga berpengaruh terhadap bauran kebijakan di setiap negara untuk mencapai kondisi perekonomian lebih baik. (Nur Siti Annazah & Nurlia Rahmatika, 2019)

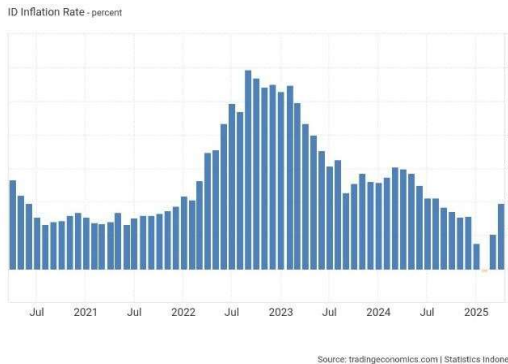
Pada tahun 1958, seorang ekonom bernama A.W. Phillips menerbitkan artikel dalam Jurnal *Economica* yang membuatnya terkenal. Artikel tersebut berjudul “*The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861–1957*”. Dalam tulisannya, Phillips menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat perubahan upah nominal, yang dalam konteks ini dapat disamakan dengan inflasi. Meskipun Phillips menggunakan inflasi dalam bentuk perubahan upah, hal ini dianggap setara karena perubahan upah dan harga umumnya bergerak searah. Adanya trade off antara inflasi dan pengangguran tersebut dikenal dengan Kurva Phillips. (Murjani, 2022)



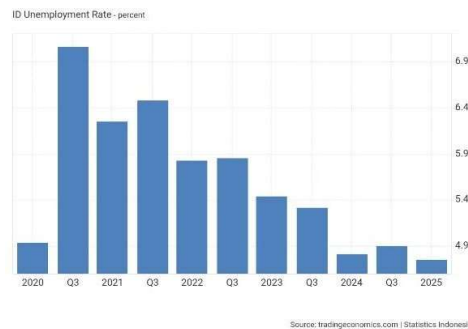
Gambar 1. Kurva Philips (Priyono & Zaenuddin Ismail, 2012)

Dalam penelitiannya Amrial (2019) menyatakan bahwa kurva Phillips merupakan hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran. Teori ini menyatakan bahwa ketika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah dan ketika inflasi rendah, tingkat pengangguran tinggi. Melemahnya Kurva Phillips di negara maju diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah maraknya penggunaan teknologi yang menjadi tanda revolusi industri (Damayanti & Purwanti, 2021). *Trade off* antara inflasi dan pengangguran keduanya memiliki tujuan yang bertentangan. Adapun dampak dari inflasi adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Ketika terjadinya kenaikan suatu barang secara terus menerus dan secara menyeluruh maka perusahaan akan banyak mengurangi

produksinya, maka dengan alasan efisiensi produsen pun akan mengurangi karyawannya untuk sementara dan ada pula yang memberhentikan karyawannya. Namun di beberapa negara berkembang dampak inflasi terhadap lapangan kerja lebih parah karena bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga angka pengangguran sulit untuk dikendalikan. (Mauizhotul Hasanah dan Safarinda Imani, 2021)



Gambar 2. Data Inflasi 2020-2025
2020-2024 Sumber: Trading Economics



Gambar 3. Data Pengangguran
Sumber: Trading Economics

Berdasarkan data inflasi dan pengangguran Indonesia, terdapat trade-off yang mencerminkan hubungan terbalik antara keduanya. ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, inflasi menurun menjadi 1,68%, sementara pengangguran meningkat tajam menjadi 7,07%. Ini mencerminkan pola klasik kurva Phillips, di mana penurunan inflasi bersamaan dengan penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan pengangguran. Selanjutnya, pada tahun 2022, saat inflasi naik menjadi 5,51% akibat kenaikan harga energi dan bahan pokok, tingkat pengangguran justru menurun ke 5,86%, yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai mendorong penciptaan lapangan kerja meskipun inflasi meningkat. Lanjut ke tahun 2023 hingga awal 2025, inflasi secara bertahap melandai misalnya, turun ke kisaran sekitar 3-4% seiring meredanya tekanan global dan mulai stabilnya harga-harga domestik. Sementara itu, tingkat pengangguran terus menunjukkan penurunan, mendekati kisaran 5% pada awal 2025. Penurunan ini mencerminkan konsistennya pemulihan ekonomi dan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, seperti hilirisasi industri dan peningkatan investasi. Dengan kata lain, meskipun inflasi sempat naik tajam pada 2022, keberhasilan pengelolaan ekonomi mendorong pengangguran turun tanpa harus mempertahankan inflasi tinggi, yang menunjukkan bahwa *trade-off* inflasi pengangguran tidak sepenuhnya kaku, dan bisa dikelola secara efektif melalui kebijakan yang tepat.

Jika tingkat pengangguran berada pada tingkat alamiah, dalam kondisi tersebut, upah riil bersifat konstan karena pekerja yang mengantisipasi tingkat inflasi tertentu akan menuntut kenaikan upah nominal yang sepadan untuk menjaga daya beli mereka. Jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter atau fiskal ekspansif guna menurunkan pengangguran di bawah tingkat alamiah, peningkatan permintaan akan membuat perusahaan menaikkan harga lebih cepat dari yang diantisipasi pekerja. Dalam jangka pendek, ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai “ilusi uang”, pekerja akan merasa pendapatan mereka meningkat dan bersedia bekerja lebih banyak, padahal daya beli mereka sebenarnya menurun karena harga naik lebih cepat. Akibatnya, pengangguran

turun sementara. Namun seiring waktu, ketika pekerja mulai menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap inflasi yang lebih tinggi, mereka akan menuntut kenaikan upah yang sesuai. Upah riil pun kembali ke tingkat semula, dan pengangguran kembali ke tingkat alamiah. Akan tetapi, inflasi harga dan upah yang tercipta akibat kebijakan ekspansif tadi tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. (Priyono & Zaenuddin Ismail, 2012)

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sudah digunakan untuk mengurangi inflasi ke tingkat kestabilan, sehingga meningkatkan pekerjaan, namun ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga terjadilah sebuah kegagalan. Terdapat model yang memiliki implikasi yang luas terhadap pengangguran, yaitu (1) Pengangguran dalam jangka pendek dan jangka panjang harus konsisten dengan tingkat permintaan nyata. (2) Pada jangka panjang, permintaan riil dan pengangguran umumnya cenderung menuju ke level yang konsisten dengan kestabilan inflasi. (3) mencapai tingkat *equilibrium* kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, dimana pengangguran diselesaikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. (Mauizhotul Hasanah dan Safarinda Imani, 2021)

Inflasi dan Pengangguran dalam Pandangan Ekonomi Islam

Inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan yang kritis di hampir seluruh Negara, Inflasi dan pengangguran disebut sebagai indicator untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu Negara. Tingginya tingkat inflasi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan sosial, begitu pula sebaliknya rendahnya tingkat inflasi akan berpotensi untuk menurunkan perekonomian seperti tingkat pertumbuhan, penurunan kemiskinan, penurunan kesempatan kerja, penurunan kesempatan kerja dan secara bertahap akan mengarah pada resesi. Keduanya merupakan sebuah

instrumen yang bertolak belakang. Islam sendiri memiliki pandangan mengenai inflasi dan pengangguran. (Mauizhotul Hasanah dan Safarinda Imani, 2021)

Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukanlah masalah ekonomi utama karena mata uang yang digunakan stabil melalui penggunaan dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yakni jika nilai emas yang mendasari nilai nominal dinar turun, antara lain karena ditemukannya emas dalam jumlah besar, masih mungkin terjadi tetapi sangat kecil kemungkinannya. Menurut para ahli ekonomi Islam, inflasi memiliki akibat yang sangat buruk bagi perekonomian karena mengganggu fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan. (Syalsa DwiI Julianda, 2024)

Armayanti & Cut Zakia Rizki (2019) menyatakan bahwa terciptanya inflasi salah satunya disebabkan oleh *cosh push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh harga barang-barang yang meningkat diakibatkan dari kenaikan biaya produksi. Inflasi dengan adanya biaya diasumsikan bahwa penawaran uang berasal dari sector riil. Sehingga adanya biaya pada inflasi disebabkan oleh adanya monopoli suatu barang atau tenaga kerja, hal ini tidak akan terjadi jika pasar sesuai dengan prinsip Islam. Dikarenakan Islam melarang untuk pemusatan kekuatan pasar pada sekelompok orang. Dengan demikian, jika penerapan ekonomi Islam diaplikasikan maka inflasi dengan adanya biaya tidak akan ada karena Islam melarang kekuasaan dalam bentuk monopoli pasar. Disamping itu, Islam pun tidak membolehkan adanya serikat pekerja yang terlalu kuat sehingga dapat memonopoli penawaran tenaga kerja. (Mauizhotul Hasanah dan Safarinda Imani, 2021)

Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja dipertanian yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. (Nani Hartati, 2020)

Dalam sistem Ekonomi Islam pengangguran dipandang sebagai masalah serius yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. (Syalsa DwiI Julianda, 2024)

Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Menanggulangi Inflasi dan Pengangguran

Kebijakan moneter merupakan sebuah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Inisiatif kebijakan moneter berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong momentum ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan melalui indikatornya seperti kebijakan suku bunga digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar, dalam artian dengan kenaikan suku bunga, maka persediaan uang terbatas yang membatasi permintaan uang karena perolehan dana menjadi lebih mahal. Apabila suku bunga diturunkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan penawaran agregat maka akan terjadinya inflasi. Namun, tekanan inflasi dalam perekonomian merupakan bagian dari fluktuasi siklus. Namun Siklus bisnis normal terganggu oleh terjadinya peristiwa dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengguncang aliran ekonomi normal, yang membuat variabel ekonomi terhenti secara tiba-tiba. (M. Rasyidin dkk, 2022)

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia telah terbukti cukup efektif dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib bank, Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target yang ditetapkan. Sejak adopsi target inflasi pada tahun 2005, Bank Indonesia telah berhasil mencapai target inflasi secara konsisten. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas harga, terutama akibat fluktuasi harga komoditas internasional dan nilai tukar rupiah. (Sulis Septiani dkk, 2024)

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. kebijakan fiskal dalam menanggulangi inflasi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan

meningkatkan pajak agar permintaan menurun. Hal ini bertujuan untuk menahan laju inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, namun harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. (Ndari Surjaningsih dkk, 2019)

Peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak luput dari pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek yakni dari Masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Kebijakan ekonomi pemerintah dalam menanggulangi inflasi dan pengangguran melibatkan penggunaan kebijakan fiskal dan moneter secara seimbang. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak agar permintaan meningkat, mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pemerintah mengatasi pengangguran terlihat pada kebijakan peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Melalui hal tersebut, Pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Langkah tersebut diambil agar mampu mencapai nilai tambah khususnya padapembukaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran. (M Rifqi Shihabuddin & Muhammad Yasin, 2024)

Solusi Ekonomi Islam terhadap Tradeoff Inflasi dan Pengangguran

Untuk mengatasi inflasi secara efektif, perlu terlebih dahulu diidentifikasi sumber penyebabnya. Inflasi alami (*natural inflation*) muncul akibat dinamika pasar, seperti meningkatnya permintaan agregat atau menurunnya penawaran agregat. Salah satu bentuk inflasi yang disebabkan oleh peningkatan agregat dapat terjadi ketika pendapatan masyarakat meningkat, sehingga permintaan terhadap barang naik dan menyebabkan lonjakan harga. Situasi semacam ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, penduduk Makkah mengalami peningkatan pendapatan karena aktivitas perdagangan luar negeri, yang kemudian mendorong permintaan barang secara signifikan dan menimbulkan inflasi. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab mengambil langkah dengan memberikan peringatan dan mengimbau masyarakat agar mengurangi konsumsi dan permintaan barang. Hasilnya, harga barang kembali stabil. (Elsa Susanti dkk, 2024)

Inflasi juga bisa terjadi karena adanya gangguan dari sisi suplai barang yang disebabkan karena panen gagal, gangguan cuaca, konflik politik, dan sebagainya. Keadaan ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, yaitu ketika terjadi bencana kelaparan. Akibatnya, produksi gandum menurun dan harga gandum naik. Kebijakan yang diambil Umar bin Khatab adalah menambah pasokan gandum dengan mengimpor gandum dari luar negeri, sehingga jumlah gandum di masyarakat bertambah dan harga gandum kembali normal. Kondisi ini juga sering kali terjadi di masa sekarang misalnya kelangkaan daging sapi, kelangkaan BBM, kelangkaan gula, dan sebagainya yang berakibat kenaikan harga atau menimbulkan inflasi. (Elsa Susanti dkk, 2024) Munculnya pengangguran di tengah Masyarakat menunjukkan adanya masalah pada struktur politik dan sosial. Oleh karena itu, sikap manusia dan struktur sosial harus diperbaiki untuk mengatasi masalah pengangguran. Perlu dikembangkan kesadaran diri tentang harkat dan nilai manusia sebagai makhluk Allah SWT yang sempurna melalui sistem pendidikan yang menyeluruh dan lengkap yang didukung oleh fasilitas yang

memadai untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Dibekali dengan pancaindra dan akal pikiran manusia mempunyai tugas dan kewajiban membangun potensi diri dan mengasah kecerdasan guna memanfaatkan karunia Allah Swt. bagi kesejahteraan hidup dan peradaban yang mulia.

KESIMPULAN

Tradeoff antara inflasi dan pengangguran merupakan tantangan kompleks dalam perekonomian yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara moral. Dalam perspektif ekonomi Islam, solusi atas *tradeoff* ini menuntut penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang dengan landasan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), dapat menekan laju inflasi tanpa mengorbankan peningkatan lapangan kerja. Selain itu, pendekatan Islam menekankan pentingnya pemberdayaan sosial, penguatan sektor riil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian integral dari upaya menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi berbasis Islam bukan hanya alternatif, tetapi juga menjadi model yang relevan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumastuti, I & Sasana, H. (2023). Hubungan Kausalitas antara Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2002-2021. *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*, 7(02), 127-134. <https://ojs.fkipummy.ac.id/index.php/jusie/article/view/657>.

Oktavia, I.D., Refalinda, H.M., Diah, A.R.P., dkk. (2024). Hubungan Inflasi Dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12), 2118- 7453. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7353>.

Leightner, J. E. (2020). "Estimates of the Inflation versus Unemployment Tradeoff that are not model Dependent". *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(1), 5-21. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2020-0001>.

Mankiw, N. G. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

Damayanti, D. A. & Purwanti, E. Y. (2021). Pengaruh Otomasi terhadap Eksistensi Kurva

Phillips di Negara Open Economy OECD. *Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1033-1043. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.42473>.

Priyono & Zainuddin, I. (2012). *Teori Ekonomi*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Annazah, N.S & Nurlia, R. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran Dan

Inflasi: Studi Kasus Di Asean 7. *Jurnal Ketenagakerjaan*. 14(2), 1907-6096. <https://www.neliti.com/publications/559948/analisis-hubungan-tingkat-pengangguran-dan-inflasi-studi-kasus-di-asean-7#id-section-content>.

Yuniarti, V.S. (2021). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Arif, R & Nur, M. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.

Sulis, S., dkk. (2024). Peran Kebijakan Moneter di Indonesia dalam Menghadapi Inflasi. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*. 1 (3), 1-7. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae/article/view/204>.

Mauizhotul, H & Safarinda, I. (2021). Pandemi Covid 19: Inflasi Dan Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. 6(1), 2089-7227.

<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1751>.

Armayanti & Cut, Z.R. (2017). Pengaruh Sektor Riil Dan Sektor Keuangan Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. 2(1), 73-83. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/2457>.

Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. 5(01), 92 - 119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>.

Julianda, S.D. (2024). *Analisis Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dalam Persepektif Islam*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Rasyidin, M., Saleh, M., Hakim, M., dkk. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*. 3(2), 225-231. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe>.

Ndari, S., Diah, U.G.A., & Budi, T. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. 14(4). <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol14/iss4/7/>.

Susanti, E., Meri, K., & Muhammad, A. (2024). Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Borneo Islamic Finance And Economic Journal*. 4(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bifej/article/view/9477>.

Amrial, A.M., & Tika, A. (2019). *Implementation of dual monetary policy and its relevance to inflation and unemployment in the Philips curve context in Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 12(5), 680-697. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-11-2018-0398/full/html>.

Murjani, A. (2022). Apakah Fenomena Kurva Phillips Terjadi di Kalimantan Selatan? Fenomena Autoregressive Distributed Lag (ARDL) pada Inflasi dan Pengangguran. *Ecoplan*, 5(2), 96-109. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.485>.

Shihabuddin, M.R. & Yasin, M. (2024). Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*. 2(3), 34-42.

<https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/2123/2214>.